

BAB V KESIMPULAN

Pembangunan pada sektor infrastruktur memiliki peran yang penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Infrastruktur yang memadai, akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu beberapa negara cenderung berusaha untuk fokus membangun sektor infrastruktur agar berdampak positif bagi pertumbuhan ekonominya. Begitu halnya juga dengan Indonesia, berbagai usaha yang melibatkan pemerintah dan masyarakat di upayakan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung pembangunan infrastruktur. Hal ini dikarenakan, ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan kunci sukses dalam percepatan pembangunan suatu negara, baik menyangkut pembangunan ekonomi dan sosial.

Pembangunan infrastruktur yang baik di suatu negara itu mencerminkan kemajuan dan kemandirian negara itu menjadi suatu negara yang makmur, dengan tujuan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat. Dalam setiap pembangunan itu terdapat campur tangan dan bantuan dari negara lain yang dianggap dan patut dalam memberikan baik itu bantuan secara riil maupun secara *Financial Investment* atau *Loan*. Kerjasama yang baik telah dilakukan oleh Indonesia dan Cina dalam penanaman investasi asing untuk membangun proyek – proyek infrastruktur di Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya memulai tradisi baru membangun sejak awal tahun 2016. Belanja konstruksi diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi dalam negeri pada 2016. Terdapat beberapa skema pembiayaan yang dapat dijadikan alternatif, baik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun tidak. Proyek kereta cepat

Jakarta – Bandung merupakan contoh pembangunan infrastruktur tanpa menggunakan dana APBN. Dengan investasi tak kurang dari 5,573 miliar dollar Amerika Serikat (AS), Konsorsium BUMN Indonesia dan Konsorsium *China Railways* menggarap proyek besar tersebut dengan skema *business to business*. Keputusan Indonesia untuk memilih Cina sebagai mitra kerjasama proyek kereta cepat Jakarta – Bandung merupakan hasil pertimbangan yang matang. Berbagai aspek yang menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam memutuskan memilih Cina sebagai mitra kerjasama proyek kereta cepat Jakarta – Bandung yakni:

Pertama, peningkatan dan perluasan hubungan kerjasama ekonomi, Sebagaimana telah disepakati dalam Pernyataan Bersama antara Republik Rakyat Cina dan Republik Indonesia, pemerintah Cina dan Indonesia setuju untuk mengembangkan Program Pengembangan Lima Tahun antara Indonesia Cina untuk Kerjasama di Bidang Perdagangan dan Kerjasama Ekonomi 2013 – 2017 sesuai dengan Rencana Lima Tahun ke – 12 untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Republik Rakyat Cina dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Republik Indonesia. Cina telah memberikan dana pada proyek – proyek infrastruktur di Indonesia, antara lain yaitu pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandara, pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer (km), pembangunan jalan kereta api sepanjang 8.700 km, serta pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW). Indonesia dengan Cina. Perluasan hubungan kerjasama ekonomi tersebut dapat diraih salah satunya dengan cara meningkatkan kerjasama ekonomi dalam bidang infrastruktur. Perluasan kerjasama ekonomi antara Indonesia – Cina juga ditandai

dengan adanya beberapa perjanjian kontrak kerjasama dan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)*.

Kedua, aspek kemampuan ekonomi, kondisi ekonomi Indonesia yang membutuhkan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tidak berbanding lurus dengan alokasi dana yang ada untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. Sehingga, pemerintah Indonesia memerlukan sumber alternatif pembiayaan infrastruktur yang lain untuk menutupi kekurangan alokasi dana pembangunan infrastruktur. Cina melalui *China Development Bank* memiliki dana operasional yang besar dan memiliki tujuan untuk membantu Indonesia mengatasi permasalahan pembiayaan infrastruktur dalam pembangunan proyek kereta cepat Jakarta – Bandung.

Ketiga, aspek untung rugi, Indonesia akan lebih banyak mendapatkan keuntungan. Karena proyek kereta cepat Jakarta – Bandung tidak akan menggunakan APBN. Skema yang akan dilakukan dalam pembangunan kereta cepat tersebut merupakan skema *business to business (B to B)*. Manfaat dibangunnya kereta cepat dengan menggunakan skema *business to business (B to B)*, selain tidak adanya resiko bagi pemerintah yang akan mengganggu APBN, dalam proses pembangunannya harus mengutamakan komponen bahan dari dalam negeri. Artinya, Indonesia akan menghemat APBN sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan pembangunan diluar pulau Jawa, manfaat lain yang akan didapatkan yakni tumbuhnya industri lain yang akan menunjang pembangunan infrastruktur kereta cepat tersebut, seperti industri baja dan alumunium. Skema *business to business (B to B)* yang dijalankan dalam pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung juga akan memberikan dampak yang besar terhadap para teknisi dan

insinyur Indonesia untuk belajar dan mengadopsi serta meningkatkan kemampuannya melalui proses alih teknologi.